Studi Penataan Permukiman Pesisir Lamanggau Di Pulau Tolandono Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Sebagai Kawasan Wisata Yang Berkelanjutan

Arifin[1], Ishak Kadir[2], La Ode Amrul Hasan[3], Annas Ma'ruf[4]
[1]Mahasiswa Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo
[2,3,4]Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo
[1]Surel: arifinarsitektur52@gmail.com

***ABSTRAK**: Kawasan permukiman pesisir merupakan kawasan yang secara umum masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Penataan kawasan permukiman pesisir sangat penting untuk dikembangkan melihat relitas saat ini salah satunya permukiman pesisir desa Lamanggau yang tergolong permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep penataan permukiman pesisir Lamanggau yang berkelanjutan dan berbasisi kearifan local. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman pesisir Lamanggau belum optimal dalam pemanfaatan lahan, bangunan rumah tinggal belum tertata dengan baik, akses penghubung dan pola sirkulasi masih kurang, serta sistem utilitas kawasan yang belum tersedia secara baik. Sementara potensi alam dan lingkungan sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata pesisir yang berbasis kearifan local dan berkelanjutan. Beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan antara lain: potensi hasil tangkapan ikan oleh nelayan dapat diolah dan dikemas, serta potensi budidaya penyu dan beberapa atraksi budaya masyarakat lokal.*

Kata kunci: Penataan, Permukiman , Wakatobi

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan bagian dari permukaan bumi yang telah dihuni oleh manusia, dan telah didukung oleh sarana dan prasaran untuk membantu keberlangsungan hidup manusi yang telah menempatinya serta menjadikannya satu kesatuan dengan tempat tinggal pemiliknya (Sumaatmadja, 1988 dikutip dalam Surtiany, 2016).

Kebutuhan akan permukiman berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan makan akan semakin tinggi problem penurunan kualitas sebuah lingkungan perkotaan, dimana lingkungan perkotaan sendiri merupakan lingkungan yang dinamis yang mengalami peningkatan dan pertumbuhan setiap harinya (Lutfi, 2012).

Munculnya perumahan-perumahan yang sudah tidak layak huni merupakan salah satu hal yang berkaitan langsung pada perkembangan fisik kota, yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang buruk, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi namun memiliki kualitas yang rendah, kurangnya RTH, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik yang rendah (Wiradisuria, dikutip dalam Ruhaida dan Sunarti, 2012).

Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengggara yang secara administratif terdiri dari gugusan pulau-ulau kecil yaitu pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Tomia merupakan pulau ketiga dan terkecil dari gugusan pulau-pulau tersebut. Pulau Tomia memiliki luas wilayah 78,84 km^2 yang terbagi dalam dua kecamatan yaitu Kecamatan Tomia seluas 32,82 km^2 dan Kecamatan

Tomia Timur seluas 46,02 km^2. Penduduk pulau Tomia berjumlah sebanyak 17.077 jiwa yaitu 7.908 jiwa penduduk Kecamatan Tomia yang terbagi dalam 2.383 Kepala Keluarga dan 9.169 jiwa penduduk Kecamatan Tomia Timur yang terbagi dalam 2.879 Kepala Keluarga, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,16 dan memiliki mata pencaharian rata-rata sebagai nelayan (Wakatobi dalam Angka 2021). Persebaran penduduk di pulau Tomia masih berpusat pada ibu kota kecamatan dan sebagian kecil bermukim di desa dan pedalaman. Penduduk Tomia adalah mayoritas penduduk asli Wakatobi yang bermukim dari pesisir pantai hingga perkampungan di wilayah perbukitan.

Selain itu di Pulau Tomia juga tepatnya di kawasan pesisir pulau Tolandono terdapat sebuah permukiman yang dihuni oleh masyarakat yang bukan penduduk asli Wakatobi, mereka adalah suku Bajo yang namanya terkenal di Indonesia. Suku Bajo merupakan etnis yang semua kegiatannya dilakukan di lautan yang biasa dikenal dengan nama pengembara lautan. Sejak puluhan tahun silam, perlahan mereka mulai memadati sebuah kawasan pesisir di pulau Tolandono yang merupakan sebuah pulau kecil yang berhadapan dengan pulau Tomia. Perjalanan waktu yang membuat mereka akhirnya mendirikan sebuah kampung di pesisir pulau tersebut yang kini disebut dengan desa Lamanggau.

Permukiman desa Lamanggau merupakan salah satu permukiman yang masuk dalam katerogi Kawasan pemukiman kumuh dimana memiliki tingkat kepadatan banguna yang tinggi, tidak teraturnya penataan bangunan, sistem utilitas kawasan yang tidak berfungsi secara optimal mulai dari sistem saluran air bersih dan air limbah, sistem drainase serta sistem persampahanhya. Hal ini yang menjadi dasar permasalahan untuk diselesaikan agar kawasan permukiman pesisir desa Lamanggau segera dibenahi.

KAJIAN PUSTAKA

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai kawasan lingkungan tempat tinggal atau kawasan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. Sementara permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan maupun pedesaan (PP No.14, 2016).

Desa wisata adalah sebuah wujud kombinasi antara akomodasi, atraksi, dan sarana pendukung yang dikenalkan dalam sebuah tata kehidupan masyarakat yang menjadi satu dengan aturan dan tradisi yang berlaku. Sebuah desa bisa disebut desa wisata ialah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan, sebuah tradisi, dan kebudayaan yang menjadi ciri khas, aksesibilitas dan sarana prasarana yang mendukung program desa wisata, keamanan yang terjamin, terjaganya ketertiban, dan kebersihan. Dasar dalam pengembangan desa wisata ialah pemahaman tentang karakter dan kemampuan elemen yang ada dalam desa, seperti: kondisi lingkungan dan alam, sosial budaya, ekonomi masyarakat, struktur tata letak, aspek *historis*, budaya masyarakat dan bangunan, termasuk *indigeneus knowledge* (pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dipunyai masyarakat (Karangasem, dalam Yusuf A. Hilman, 2018).

Menurut (Gobel,2019) sebuah master plan penataan kawasan pemukiman dibentuk oleh Sembilan veriabel yang digunakan untuk melakukan kajian literatur dan analisis

terhadap sebuah permasalahan dalam lokasi perencanaan, variable tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Pemanfaatan Lahan.
2. Pemetaan Intensitas kepadatan bangunan.
3. Pemetaan Tata Bangunan.
4. Pemetaan Tata Sirkulasi.
5. Pemetaan Ruang Terbuka dan Vegetasi.
6. Pemetaan Aktivitas Pendukung.
7. Pemetaan Tata Informasi dan Street Furniture.
8. Pemetaan Jaringan Utilitas.
9. Pemetaan Infrastruktur Kawasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan desktiptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting kawasan perencanaan serta realitas sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan menjadikan hal tersebut sebagai gambaran awal untuk mengidentifikasi potensi dan masalah, kemudian merumuskan konsep penataan kawasan permukiman untuk mendukung aktivitas wisata pesisir yang berkelanjutan.

Tahapan Penelitian

Tahapan awal yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada di kawasan perencanaan, kemudian dilakukan analisis terkait dengan:

1. Rencana pemetaan pemanfaatan lahan, dengan melakukan identifikasi pemanfaatan lahan di lokasi perencanaan baik secara makro maupun secara mikro.
2. Rencana tata bangunan, dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi tata bangunan yang ada dikawasan perencanaan.
3. Rencana pemetaan jalur penghubung dan sirkulasi, dengan melakukan inventarisasi sistem transportasi baik dari dalam kawasan perencanaan maupun ke dalam kawasan perencanaan, serta sistem pergerakan transportasi dan pejalan kaki di dalam lokasi perencanaan.
4. Rencana pemetaan sistem utilitas, dengan melakukan identifikasi dan inventariasi sistem dan kondisi utilitas didalam lokasi perencanaan.

Variabel tersebut digunakan sebagai patokan dalam mencari data potensi dan permaslahannya. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan untuk mendata secara langsung potensi dan data lapangan serta diperkuat dengan wawancara dengan beberapa informan. untuk menemukan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterprestasikan dengan menggunakan dasar-dasar teori dan logika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Kawasan perencanaan berada di desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan berada di pulau Tolandono berseblahan dengan pulau Tomia. Berdasarkan PERDA Kabupaten Wakatobi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pulau Tolandono termasuk dalam Kawasan pariwisata yang diatur dalam PERDA Kabupaten Wakatobi pasal 31.



(a) Pulau Tolandono (b) Pulau Tomia

Gambar 1. Pulau Tomia dan Pulau Tolandono
Sumber: Google Earth, diakses 19 Juli 2021



Gambar 2. Permukiman Pesisir Desa Lamanggau
Sumber : Google Earth, dikases 19 Juli 2021

Kondisi Eksisting

Kondisi Tata Guna Lahan

Secara umum penggunaan lahan di dalam kawasan perencanaan didominasi oleh fungsi permukiman Selain itu juga terdapat bangunan fasilitas umum berupa Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Atas (SMP), masjid dan fasilitas perdagangan dan jasa berupa kios.



Gambar 3. Tata Guna Lahan Eksisting
Sumber: Diolah dari Citra Satelit Google Earth, 2021

Pola Pemukiman

Secara umum, kondisi eksisting pola pemukiman desa Lamanggau tidak beraturan, ada yang tersebar di bagian perairan dan ada juga yang tersebar dibagian daratan, pola permukiman membentuk pola linear mengikuti pesisir pantai. Pemukiman di desa Lamanggau dihubungkan oleh jalan lingkungan yang terbuat dari rabat beton dan juga jembatan dengan dimensi kurang lebih 3-4 meter.



(a) Jalan Rabat Beton (b) Jalan Jembatan Kayu
Kondisi jalan di desa Lamanggau
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021



Gambar 4. Pola Permukiman Eksisting
Sumber: Diolah dari Citra Satelit Gogle Earth, 2021.

Kondisi Hunian

Secara umum kondisi fisik bangunan pada lokasi perencanaan yaitu kawasan pesisir desa Lamanggau umumnya terbagi menjadi hunian permanen yang terbuat dari beton dan hunian panggung yang terbuat dari kayu dan bambu sehingga kondisinya masih ada yang belum layak huni. Pola pertumbuhan permukiman tersebut kurang teratur dan tidak merata, sarana aksesbilitas yang ada berupa jalan rabat selebar 4 meter sebagai jalan utama dan beberapa jembatan kayu sebagai jalan lingkungan. Beberapa sarana dan prasarana

lingkungan sudah tersedia namun belum memadai seperti saluran air bersih, saluran pembuangan air, pengelolaan sampah, maupun saluran pematusan dan sebagainya. Fasilitas umum yang sudah ada hanya berupa fasilitas peribadatan (mesjid), fasilitas perdagangan (warung kecil). Fenomena itu tergambar dengan jelas pada kawasan studi sebagai kawasan yang kumuh.



(a) Hunian Panggung



(b) Hunian Permanen

Gambar 5. Kondisi Hunian di desa Lamanggau
Sumber: Dokumentasi Penulis,2021.

Jaringan Pergerakan

Jalur penghubung atau sistem sirkulasi dan aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah kawasan permukiman. Aksesibilitas didalam sebuah kawasan perencanaan yang mudah dicapai menunjukan kawasan perencanaan telah tertata dengan rapi. Pola pergerakan kendaraan di kawasan perencanaan ini terdiri dari pergerakan kendaraan bermotor saja, untuk mencapai lokasi perencanaan baik menuju ke lokasi perencanaan maupun akses ke luar dari lokasi perencanaan diperlukan akses perahu karena lokasi kawasan perencanaan berada disebuah pulau terpisah dari pusat kegiatan yang ada diskala kecamatan. gambaran lebih detailnya sebagai berikut :

1. Koridor utama kawasan perencanaan (akses utama menuju lokasi perencanaan) merupakan akses yang melewati perairan selat Kasilapa. Pergerakan pada koridor ini adalah pergerakan eksternal ke luar wilayah perencanaan maupun pergerakan internal atau menuju wilayah kawasan perencanaan.
2. Pergerakan internal di kawasan ini terdiri dari pergerakan pejalan kaki melalui jalan setapak dari kayu dan pergerakan kendaraan roda 2 melalui jalan rabat beton.
3. Sarana aksesbilitas yang ada berupa jalan rabat beton dengan lebar 3-5 meter.
4. Sebagai jalan penghubung, yang menghubungkan antar rumah warga, berupa jembatan kayu dengan ukuran lebar kurang lebih 2-3 meter yang dibangun diatas air pasang surut dengan disanggah tongkat kayu maupun beton.

Kondisi Utilitas Lingkungan

Kondisi utilitas lingkungan pada kawasan perencanaan yaitu:

Jaringan Listrik

Kawasan perencanaan telah terlayani jaringan listrik dari PLN. Hal ini terlihat dari 95% penggunaan PLN sebagai sumber listrik di wilayah ini. Jaringan listrik pada kawasan perencanaan berupa jaringan SUTR pada kawasan permukiman dan jaringan SUTM pada tepi jalan. Sementara untuk penerang jalan belum memadai.

Jaringan Pematusan/Drainase

Jaringan pematusan/drainase dilokasi perencanaan belum terpenuhi. Jalan pada kawasan perencanaan tidak memiliki saluran drainase. Semua saluran di kawasan perencanaan dan sekitarnya bermuara di laut.

Jaringan Air Minum

Pelayanan jaringan air minum dilokasi perencanaan belum memadai karena hanya mengandalkan sumber air bersih yang dikelolah oleh pemerintah desa, dengan membuat penampungan air bersih yang diperoleh dari mata air yang ada dilokasi perencanaan.

Jaringan Telekomunikasi

Secara umum wilayah perencanaan telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi. Jenis sarana komunikasi yang terdapat di wilayah perencanaan meliputi telepon seluler (ponsel). Terdapat juga beberapa titik menara telekomunikasi di luar wilayah perencanaan dan satu menara telekomunikasi yang berada di dalam lokasi perencanaan.

Jaringan Sanitasi dan Persampahan

Penduduk di wilayah kawasan perencanaan dipastikan sebagian besar telah memiliki kamar mandi sendiri untuk pembuangan air limbah rumah tangga. Semua rumah warga hampi bisa dipastikan memiliki jamban dengan septictank. Hanya beberapa rumah saja yang belum memiliki jamban dan kamar mandi sendiri dan sistem pembuangan limbahnya langsung dibuang ke laut, kondisi ini hanya terdapat pada kompleks hunian yang masih menempati hunian panggung di area perairan.

Konsep Perencanaan

Visi Kawasan

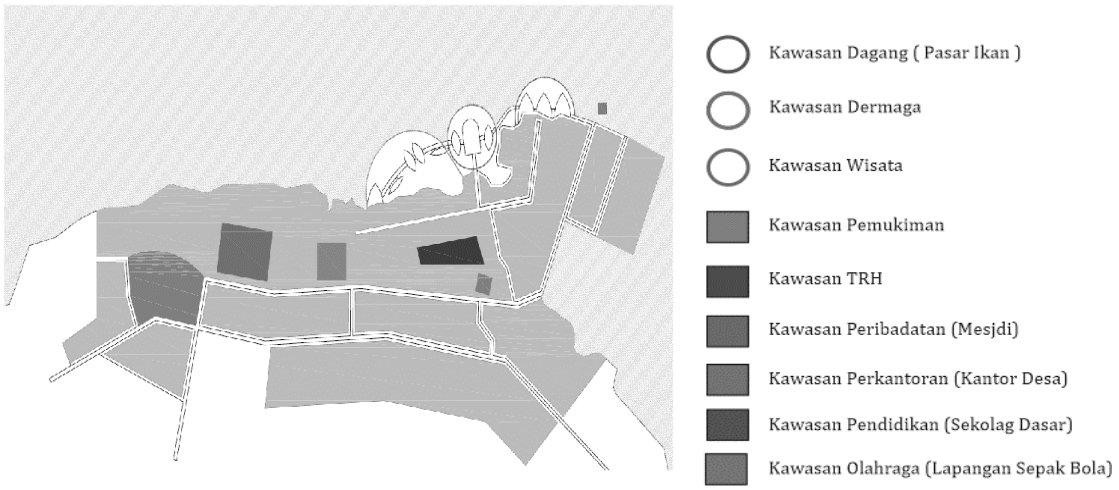
Visi perencanaan kawasan permukiman pesisir desa Lamanggau adalah “Menjadikan Kawasan Permukiman Pesisir Desa Lamanggau Menjadi Kawasan Pesisir Yang Memberdayakan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kawasan Wisata Yang Berkelanjutan”

Rencana Tata Guna Lahan

Struktur peruntukan lahan merupakan salah satu langkah awal menyusun komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Komponen penataan dalam struktur peruntukan lahan antara lain:

Peruntukan Lahan Makro

Peruntukan lahan makro, merupakan salah satu komponen penyusunan struktur tata guna lahan skala kawasan yang membahas peruntukan tata guna lahan secara umum dilokasi perencanaan. Untuk lokasi perencanaan permukiman pesisir desa Lamanggau sendiri dibagi menjadi beberapa kawasan peruntukan lahan, mulai dari kawasan permukiman, kawasan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan olahraga yang disesuaikan dengan kondisi eksisting kawasan yang telah ada, sementara itu terdapat pula zona kawasan yang ditambahkan untuk menunjang keberhasilan penataan kawasan permukiman, yaitu adanya kawasan perdadangan (pasar ikan dan lapak penjualan), kawasan rekreasi, dan kawasan dermaga atau pelabuhan.



Gambar 6. Gambar Rencana Peruntukan Lahan
Sumber : Analisis Penulis,2021

Rencana peruntukan lahan makro dilokasi perencanaan adalah sebagai berikut :

Fungsi Permukiman

Fungsi permukiman dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perencanaan. Permukiman yang direncanakan adalah permukiman kepadatan sedang sampai dengan rendah. Lokasi rencana permukiman dikembangkan pada permukiman eksisting yang dilakukan secara individu.

Fungsi Perdagangan dan Jasa

Fungsi perdagaagan dan jasa dikembangkan sebagai kegiatan utama di kawasan ini. Perdagangan dan jasa yang dikembangkan adalah skala lingkungan berupa pembuatan pasar ikan lokal dan lapak penjualan yang merupakan potensi tertinggi yang bisa dikembangkan pada lokasi perencanaan dan kegiatan perdagangan jasa lainnya. Perdagangan jasa direncanakan di area depan lokasi perencanaan yang dekat dengan akses masuk menuju lokasi perencanaan.

Fungsi Fasilitas Umum

Pengembangan fasilitas umum adalah mempertahankan keberadaan fasilitas umum eksisting yaitu fasilitas pendidikan, sarana perkantoran, sarana peribadatan serta sarana olahraga.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi ruang terbuka hijau yang direncanakan dengan fungsi aktif di tengah-tengah lokasi perencanaan. RTH aktif ini didesain dengan menyediakan ruang publik yang menjadi area zona kumpul aktivitas masyarakat atau ruang public dengan menggunakan pendekatan arsitektru yang mengadaptasi kearifan local

Fungsi Kawasan Wisata Tepian Air

Fungsi kawasan wisata direncanakan di sisi utara lokasi perencanaan. Selain didesain untuk memanfaatkan potensi pantai, juga untuk mengantisipasi potensi ancaman ombak pasang dan untuk membatasi adanya pembangunan permukiman yang tidak teratur kearah perairan. Kawasan wisata tepian air direncanakan dengan memanfaatkan potensi yang ada pada lokasi perencanaan, mulai potensi dari alam sampai pada potensi budaya. Potensi

alam meliputi potensi keindahan alam pesisir Lamanggau, potensi biota laut seperti ikan dan penyu (*Honu*) yang bisa dimanfaatkan, selain untuk makanan khas Lamanggau seperti ikan kering dan ikan asap juga bisa dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, sementara dari segi potensi budaya kita dapat merasakan keharmonisan kehidupan masyarakat bajo dipesisir Lamanggau yang masih memiliki jiwa kekeluargaan yang tinggi. Potensi ini yang kemudian perlu dikembangkan untuk menunjang terciptanya kawasan pesisir Lamanggau yang memberdayakan kerifan lokal dalam mewujudkan kawasan wisata yang berkelanjutan.

.

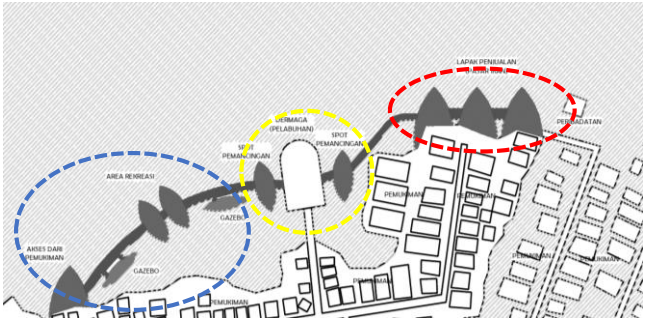


Gambar 7. Potensi wisata tepian air
Sumber: https://youtu.be/FyELZw2LYTg



Gambar 8. Potensi hewan laut
Sumber : ayojalanjalan.com

Desain kawasan pengembangan dibagian kawasan pesisir Lamanggau akan dibagi kedalam tiga area, yaitu area dermaga yang merupakan pintu masuk utama menuju kawasan perencanaan, area perdagangan untuk menunjang potensi wisata berupa lapak lapak penjualan makanan khas Lamanggau serta area wisata berupa adanya spot pemancingan dan gazebo-gazebo untuk menikmati keindahan pesisir desa Lamanggau.



Gambar 9. Rencana are pengembangan
Sumber: Analisis Penulis,2021

Peruntukan Lahan Mikro

Peruntukan lahan mikro adalah salah satu komponen perencanaan struktur pemanfaatan lahan dengan skala yang lebih rinci dan detail dengan memperhatikan keseimbangan dan konektifitas antar fungsi kawasan. Peruntukan lahan mikro merupakan pendetailan dari peruntukan lahan makro. Rencana peruntukan lahan mikro kawasan perencanaan adalah dengan pengembangan pada masing-masing dusun, yang meliputi:

Tabel 1. Peruntukan lahan secara mikro

NO	Fungsi	Jenis Kegiatan
1	Fungsi Permukiman	Permukiman : Rumah
	Fungsi Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa ; Pasar Ikan dan lainya
	Fungsi Ruang Terbuka Hijauh	RTH : Ruang Publik di tengah kawasan
	Fungsi Fasilitas Umum	

	Fasilitas Umum : Perkantoran, peribadatan dan olahraga

Sumber: RTRW Kab. Wakatobi tahun 2012-2032

Rencana Tata Bangunan

Rencana tata bangunan pada kawasan perencanaan di kawasan pesisir desa Lamanggau ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kawasan perencanaan yang lebih aktif dan komuniktif serta menciptakan konektifitas atar bangunan yang lebih efektif. Rencana tata bangunan mencangkup bentuk bangunan dan besaran bangunan yang membentuk ruang luar yang akomodatif terhadap berbagai kegiatan. Secara umum, tata bangunan dibentuk oleh suatu batas khayal ambang volume (*building envelope*) yang tercipta dari penggabungan ketinggian maksimum bangunan serta batasan luas bangunan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin terpeliharanya kelenturan (*fleksibilitas*) yang tinggi dalam perancangan bangunan dengan tetap mengupayakan terpenuhinya peruntukkan lahan, serta mengenali batasan dari intensitas pembangunan yang dapat ditampung dalam suatu sub-blok.

Pendekatan konsep arsitektur perlu diperhatikan agar dapat menciptakan sebuah identitas dan citra sebuah kawasan perencanaan pemukiman pesisir desa Lamanggau yang kental akan budaya pesisirnya. Identitas kawasan akan menjaga terpeliharanya budaya dan historis dari Kawasan perencanaan. Langgam arsitektur yang akan digunakan pada bangunan khususnya hunian akan tetap menerapkan konsep atau langgam arsitektur pesisir Lamanggau, sementara untuk bangunan fasilitas umum tetap mempertimbangkan aspek atau konsep arsitektur kekinian tanpa menghilangkan budaya-budaya yang ada pada lokasi perencanaan.

Rencana Jalur Penghubung dan Sirkulasi

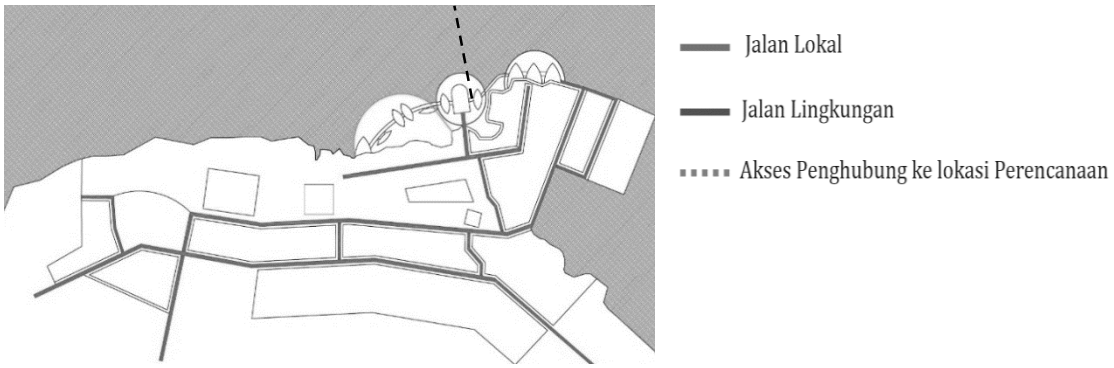
Konsep penataan sirkulasi kawasan perencanaan didasarkan pada sebuah aspek yang memenuhi kebutuhan pergerakan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, dan pelabuhan. Penataan sirkulasi meliputi sistem pergerakan arus kendaraan baik kendaraan antar kawasan perencanaan dengan menggunakan perahu air maupun pergerakan arus kendaraan di dalam kawasan perencanaan yang menggunakan kendaraan roda dua. Selain itu juga membahas mengenai fungsi dan pengembangan jaringan jalan, dan trotoar serta parkiran. Konsep dasar dalam penataan sistem pergerakan dalam kawasan perencanaan antara lain:

1. Memberi kemudahan konektifitas bagi setiap bentuk pergerakan orang, barang, dan kendaraan, baik konektifitas antar kawasan perencanaan maupun konektifitas di dalam lokasi perencanaan.
2. Memberi kehandalan baik dari sudut pandang waktu, keamanan dan kenyamanan pengguna.
3. Memperhatikan kelengkapan unsur pendukung pergerakan atau aksesibitas seperti rambu-rambu, papan pengarah, elemen-elemen estetika dan street furniture.

Berdasarkan prinsip di atas, maka rencana pola jaringan jalan pada kawasan perencanaan yaitu :

1. Mempertahankan pola jaringan jalan yang sudah sesuai (kondisi eksisting).

2. Menyesuaikan hirarki dan dimensi jalan sesuai PP. No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
3. Meningkatkan kualitas dan kenyaman aksesbilitas dengan pedestrian yang ramah dan kelengkapan street furniture.
4. Menyediakan dermaga sebagai titik pusat kendaraan motor air sebagai akses utama menuju kawasan perencanaan maupun akses untuk meninggalkan lokasi perencanaan.



Gambar 8. Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung
Sumber : Analisis penulis,2021

Rencana Utilitas Lingkungan
Sistem Jaringan Air Bersih

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sistem jaringan air bersih yaitu kontinuitas, kuantitas dan kualitas. Perencanaan sistem jaringan air bersih dikawasan perencanaan secara kontinuitas harus tersedia secara 24 jam, dan secara kuantitas perencanaan pengadaan air bersih dilokasi perencanaan akan tersedia dengan baik dan optimal dijam-jam puncak pemakaian air, serta secara kualitas pengadaan air bersih dilokasi perencanaan akan tetap terjaga kualitasnya. Kawasan perencanaan merupakan area pelayanan dengan sistem distribusi air bersih yang dikelola oleh swadaya pemerintah desa akan tetapi didalam perencanaan perpipaanya akan tetap mengacu pada ketentuan teknis yang sesuai dengan standar PDAM. Pemasangan pipa dilakukan dengan jarak minimal 0,5 meter dari badan jalan dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Untuk sistem pengaliran direncanakan menggunakan sistem kombinasi yang menggabungkan sistem gravitasi dengan sistem pemompaan, walaupun dari segi biaya kurang ekonomis, namun kondisi topografi kawasan menjadi pertimbangan utama pemilihan sistem pengaliran air minum dalam wilayah perencanaan.

Sistem Jaringan Air Limbah dan Air Kotor

Lokasi perencanaan akan menggunakan sistem sanitasi setempat (*On Site Sanitation*) dengan pembuatan *septic tank* di tiap-tiap rumah tangga. Pada kawasan perencanaan sistem *On Site Sanitation* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Secara Individual, yaitu sistem pembuangan melalui *septictank* masing-masing hunian :

- Air limbah dari WC (*black water*) dan air limbah bekas cucian, mandi, (*grey water*) disalurkan ke dalam tangki *septictank* yang dilengkapi dengan peresapan.
- Air limbah dari WC (*black water*) disalurkan ke dalam tangki *septictank* yang dilengkapi dengan peresapan. Sedangkan air limbah bekas cucian, mandi, (*grey water*) langsung dibuang ke badan air/lingkungan atau saluran drainase.

2. Secara Komunal, yaitu sistem pembuangan melalui WC umum.

Sistem Jaringan Drainase

Limpasan air hujan yang ada di kawasan perencanaan perlu penanganan khusus, yaitu dengan penyediaan saluran-saluran pembuangan. Pematusan air hujan yang terencana dengan sistem drainase yang baik dapat mencegah erosi akibat aliran air, mencegah kerusakan bangunan lainnya seperti jalan, perumahan, bangunan-bangunan penting lainnya. Arahan sistem drainase di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi saluran drainase yang sudah ada pada wilayah perencanaan.
2. Menambah panjang saluran, dan mengintegrasikan jaringan saluran.
3. Pelaksanaan pembersihan dan perawatan saluran drainase yang sudah ada dengan cara normalisasi saluran, peningkatan dimensi saluran, penambahan saluran dan bak kontrol.

Master Plan Kawasan

Master plan kawasan didesain mengacu pada konsep dan rencana perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya dimana pada master plan kawasan di tampilkan penataan kawasan yang dalam perancangannya dapat mendukung visi kawasan yaitu menjadikan kawasan permukiman pesisir desa lamanggau menjadi kawasan pesisir yang memberdayakan kearifan lokal dalam mewujudkan kawasan pesisir yang berkelanjutan.



Gambar 9. Master Plan Kawasan
Sumber : Analisis penulis, 2021

KESIMPULAN

Untuk menciptakan kawasan pesisir desa Lamanggau menjadi kawasan permukiman pesisi yang memberdayakan kearifan lokal dalam mewujudkan kawasan wisata yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan penataan permukiman dan bangunan di dalamnya yang tidak layak huni. Penataan tersebut meliputi: penataan kembali rencana peruntukan lahan, tata bangunan, aksesibilitas serta sarana dan prasarana utilitas lingkungan. Sementara untuk mewujudkan pesisir desa Lamanggau menjadi kawasan wisata yang berkelanjutan maka perlu dikembangkan potensi-potensi yang ada di lokasi perencanaan, seperti pengembangan wisata tepian air yang berfungsi sebagai tempat wisata dan rekreasi juga dapat dimanfaatkan sebagai pembatas (*barrier*) terhadap pengembangan permukiman ke arah perairan. Selain itu untuk mendukung aktivitas pariwisata di permukiman desa Lamanngau perlu adanya pengembangan potensi wisata pesisir yang berbasis kearifan lokal meliputi pengembangan antraksi budaya masyarakat lokal dan akulturasi budaya dengan masyarakat Bajo serta pengembangan potensi budidaya penyu dan biota laut lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dan pemerintahan Kecamatan Tomia dan Desa Lamanggau atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Jurusan Arsitektur UHO atas izin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di Wakatobi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2012. Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032, Perda Kab. Wakatobi No. 12 Tahun 2012, Bappeda Kabupaten Wakatobi.

BPS Kabupaten Wakatobi. 2021. Wakatobi dalam Angka 2021.

Gobel. 2019. Konsep Penataan Kawasan Pemukiman Desa Lumito : *Jurnal of Infrastructure Science Enginering* : *Vol.2.*

Hilman A.2018. Kajian Kritis Tentang Inovasi Daerah Terkait Pengembangan Dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas : *Jurnal Ilmu Kepariwisataan : Vol.21.*

Lutfi, M Khakim. 2012. *Pola Persebaran Permukiman di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*. Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sadana, A. S. 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sajid, S. M., 2014. *Adaptasi Bentuk Permukiman Pesisir Kampung Laut Segara Anakan Akibat Sedimentasi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Surtiany, Eny Endang. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota*. Tesis. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP Semarang.

UN-HABITAT. 1982. *Survey of Slums and Squatter Settlements*. Dublin: Tycooly International Publishing Ltd.